



Analisis Perbandingan Penerapan *E-Government* di Indonesia dan Singapura (Kajian Pengelolaan Manajemen Keuangan pada Organisasi Publik)

Surya Galih Salim Wahidin¹, Andrea Maharani², Venia Azalia Syakira³, Hanifah Nur Syita⁴, Mawar⁵

^{1,2,3,4,5} Universitas Muhammadiyah Jakarta, Indonesia

Email : suryagalih614@gmail.com

Article Info

Article history:

Received April 06, 2025

Revised April 17, 2025

Accepted April 27, 2025

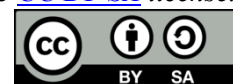
Keywords:

E-Government, Public Finance, Indonesia, Singapore, Governance

ABSTRACT

The development of information technology has encouraged the government to implement an E-Government system as an effort to improve efficiency, transparency and accountability in public financial management. This study aims to compare the implementation of E-Government in public financial management between Indonesia and Singapore. The method used is a literature review by analyzing sources from journals, books, and official documents. The results show that Singapore has successfully achieved an integrated level of digitization of public finance through platforms such as GeBIZ and CPF, supported by high digital literacy of the apparatus, adequate technological infrastructure, and a performance-based evaluation system. Meanwhile, Indonesia still faces challenges in the form of information system fragmentation, low data integration across agencies, and limited human resource capacity. The conclusion of this study confirms that the success of E-Government implementation is not only determined by technological readiness, but also by political commitment, bureaucratic culture, and policy consistency. Therefore, it is recommended that Indonesia strengthen the integration of financial information systems, improve ASN digital literacy, and build a structured evaluation system so that digital transformation in the public finance sector can run optimally.

This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.



Article Info

Article history:

Received April 06, 2025

Revised April 17, 2025

Accepted April 27, 2025

Kata Kunci:

E-Government, Keuangan Publik, Indonesia, Singapura, Tata Kelola Pemerintahan

ABSTRAK

Perkembangan teknologi informasi telah mendorong pemerintah untuk menerapkan sistem E-Government sebagai upaya meningkatkan efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan publik. Penelitian ini bertujuan untuk membandingkan penerapan E-Government dalam manajemen keuangan publik antara Indonesia dan Singapura. Metode yang digunakan adalah tinjauan literatur dengan menganalisis sumber dari jurnal, buku, dan dokumen resmi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Singapura telah berhasil mencapai tingkat digitalisasi keuangan publik yang terintegrasi melalui platform seperti GeBIZ dan CPF, didukung oleh literasi digital aparatur yang tinggi, infrastruktur teknologi yang memadai, serta sistem evaluasi berbasis kinerja. Sementara itu, Indonesia masih menghadapi tantangan berupa fragmentasi sistem informasi, rendahnya integrasi data lintas instansi, serta keterbatasan kapasitas sumber daya manusia. Kesimpulan dari penelitian ini menegaskan bahwa keberhasilan penerapan E-Government tidak hanya ditentukan oleh kesiapan teknologi, tetapi juga oleh komitmen politik, budaya birokrasi, dan konsistensi kebijakan. Oleh karena itu, disarankan agar Indonesia memperkuat



integrasi sistem informasi keuangan, meningkatkan literasi digital ASN, dan membangun sistem evaluasi yang terstruktur agar transformasi digital di sektor keuangan publik dapat berjalan secara optimal.

This is an open access article under the [CC BY-SA](#) license.



Corresponding Author:

Surya Galih Salim Wahidin

Universitas Muhammadiyah Jakarta

E-mail: suryagalih614@gmail.com

PENDAHULUAN

Kemajuan teknologi informasi saat ini semakin nyata dan dapat dilihat dari cara penyajian informasi yang mengalami inovasi melalui teknologi digital, yang memudahkan akses terhadap informasi (Khoiriyanti, 2022). Seiring dengan pesatnya perkembangan teknologi ini, ekspektasi masyarakat terhadap kinerja pemerintah juga meningkat, khususnya dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang berlandaskan prinsip *Good Governance*. Hal tersebut menjadi latar belakang lahirnya dan diterapkannya Sistem Informasi berbasis *Electronic Government* (Risya Nurindahsari & Trisyanto, 2022).

E-Government merupakan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) oleh instansi pemerintahan untuk menyelenggarakan pelayanan publik, mengelola proses administrasi, serta mempererat interaksi antara pemerintah, warga negara, dan berbagai pihak berkepentingan (Aw, 2024). *E-Government* merupakan bentuk penyampaian informasi dari pemerintah kepada masyarakat melalui pemanfaatan teknologi daring, yang memungkinkan pertukaran data secara efisien. Saat ini, banyak kementerian dan lembaga telah mulai mengimplementasikan sistem ini. Mengingat besarnya biaya yang diperlukan untuk mengembangkan *E-Government*, maka keberhasilan pelaksanaannya serta pencapaian tujuan strategis memerlukan proses yang terstruktur, meliputi perencanaan, implementasi, pemanfaatan, hingga evaluasi sistem secara menyeluruh. Oleh karena itu, agar keterbatasan sumber daya dapat dioptimalkan, alokasi anggaran untuk pengembangan *E-Government* harus direncanakan dengan cermat dan dijalankan secara akuntabel (Wau & Dompok, 2022).

Menurut informasi dari *United Nations*, Singapura merupakan satu-satunya negara di Asia Tenggara yang memiliki perkembangan *E-Government* terbaik dan mampu bersaing dengan negara-negara maju di Eropa dan Amerika. Peringkat Singapura dalam *E-Government development index* menunjukkan kemajuan yang signifikan.

Tabel 1. Perkembangan *E-Government Development Index* (EGDI)

Tahun	Peringkat Singapura	Peringkat Indonesia
2010	11	109
2012	10	97
2014	3	106
2016	4	116
2017	7	-



2018	7	107
2020	11	88
2022	12	77

Berdasarkan tabel perkembangan *E-Government Development Index* (EGDI) antara Singapura dan Indonesia dari tahun 2010 hingga 2022, terlihat perbedaan yang sangat mencolok dalam hal pencapaian dan konsistensi.

Singapura menunjukkan performa yang sangat kuat dan stabil sebagai pemimpin di kawasan Asia Tenggara dalam pengembangan *E-Government*. Mulai dari peringkat 11 pada tahun 2010, Singapura berhasil masuk ke posisi 3 besar dunia pada tahun 2014. Walaupun setelah itu posisinya sedikit menurun, Singapura tetap berada dalam jajaran 15 besar dunia hingga 2022, yang menunjukkan komitmen dan kemampuan negara tersebut dalam mengembangkan sistem pemerintahan berbasis digital secara konsisten dan berdaya saing tinggi dengan negara-negara maju lainnya.

Gambar 1. Tren Peringkat *E-Government* Indonesia (2010-2022)
Tren Peringkat E-Government Indonesia (2010-2022)

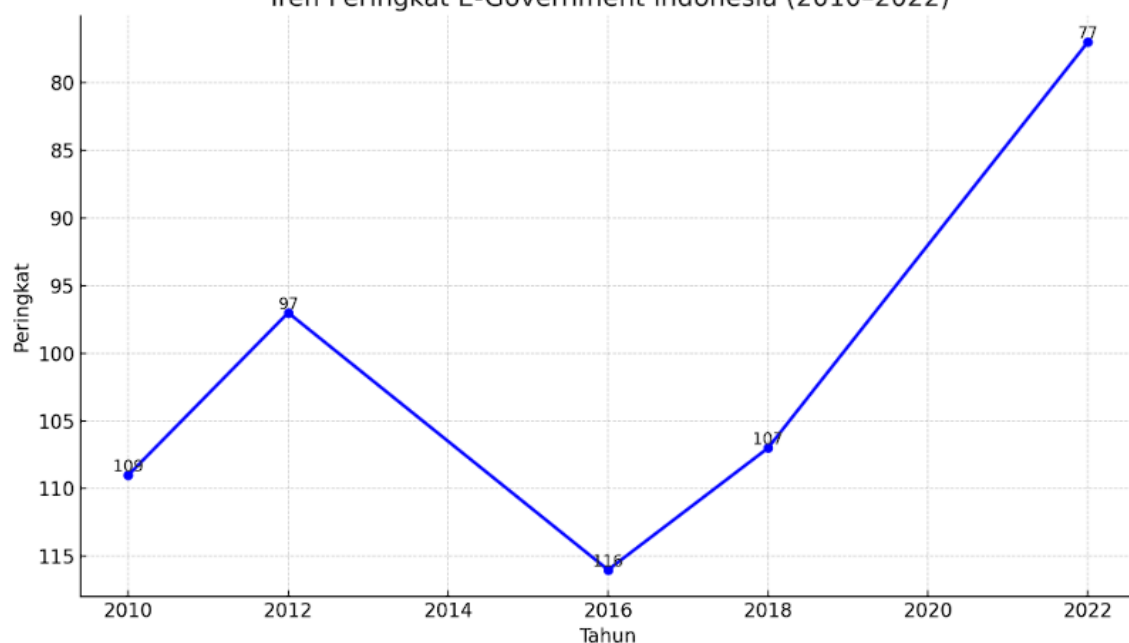


Diagram tersebut menunjukkan tren fluktuatif peringkat *E-Government* Indonesia dari tahun 2010 hingga 2022 berdasarkan data EGDI. Pada tahun 2010, Indonesia berada di peringkat 109, kemudian mengalami peningkatan ke posisi 97 pada 2012. Namun, terjadi penurunan signifikan pada 2016 ke peringkat 116, menandakan kemunduran dalam pengembangan layanan digital pemerintah. Sejak 2018, tren mulai membaik secara konsisten, dengan kenaikan dari peringkat 107 pada 2018 menjadi 77 pada 2022. Perbaikan ini mencerminkan adanya kemajuan dalam implementasi kebijakan digital dan pembangunan infrastruktur teknologi informasi, meskipun Indonesia masih tertinggal dibandingkan negara-negara maju seperti Singapura (Arief, 2023).

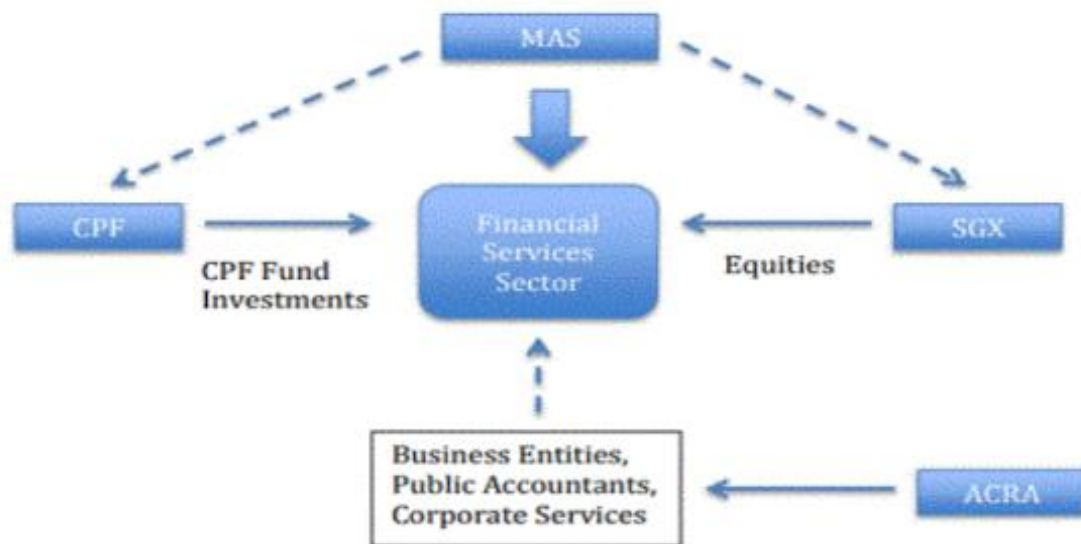
Pertumbuhan sektor jasa keuangan di Singapura semakin kompleks dan bersifat global, ditandai dengan meningkatnya jumlah lembaga keuangan domestik maupun asing. Kondisi ini menuntut pendekatan regulasi yang lebih terpadu. Sebagai respons, pemerintah memberlakukan



Monetary Authority of Singapore Act pada tahun 1971 yang menjadi dasar pembentukan *Monetary Authority of Singapore (MAS)*. MAS menjalankan fungsi ganda sebagai bank sentral dan otoritas pengawas keuangan (Gondokusumo, 2023).

Selain MAS, lembaga lain juga berkontribusi dalam sistem regulasi keuangan. *Singapore Exchange (SGX)* berwenang mengatur anggotanya serta menjamin legalitas transaksi di bursa. *Central Provident Fund (CPF) Board* bertugas mengelola investasi dana pensiun wajib, sementara *Accounting and Corporate Regulatory Authority (ACRA)* mengawasi kegiatan badan usaha, akuntan publik, dan penyedia jasa korporasi, yang meskipun tidak langsung terkait sektor keuangan, tetap bersinggungan dengan aktivitas lembaga keuangan. (Gondokusumo, 2023) Untuk sistematikanya dapat dilihat berdasarkan gambar berikut :

Gambar 2. *Financial Policy Entities*



METODE PENELITIAN

Metode yang diterapkan dalam penelitian ini adalah pendekatan tinjauan literatur, yang menganalisis temuan-temuan dari literatur yang relevan dengan tema penelitian, termasuk artikel di jurnal, teori yang terdapat dalam buku, serta informasi dari situs web. Tujuannya adalah untuk menyajikan materi dengan penekanan pada topik yang diteliti, sehingga dapat menghasilkan temuan terbaru (Yam, 2024).

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Penerapan *E-Government* di Indonesia dalam Pengelolaan Keuangan Publik

Penerapan *E-Government* di Indonesia untuk pengelolaan keuangan publik menunjukkan progres yang cukup signifikan dalam dekade terakhir, meskipun masih menghadapi sejumlah tantangan struktural dan teknis. Pemerintah Indonesia telah mengembangkan berbagai sistem seperti e-budgeting, Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI), Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD), hingga *e-audit*. Sistem-sistem ini diharapkan dapat meningkatkan transparansi dan efisiensi dalam proses perencanaan, pelaksanaan, hingga pengawasan anggaran.

Namun demikian, penerapan *E-Government* dalam pengelolaan keuangan publik di Indonesia masih berada dalam tahap pengembangan yang belum merata. Meskipun sistem



digital seperti *e-budgeting*, *e-audit*, dan SIPD telah diadopsi di berbagai instansi, implementasinya belum terintegrasi sepenuhnya di seluruh wilayah dan level pemerintahan. Fragmentasi sistem masih menjadi tantangan utama, karena berbagai platform seperti Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA), SAKTI dari Kementerian Keuangan, dan *e-Monev* Bappenas berjalan secara terpisah tanpa integrasi data yang kuat. Kondisi ini menyebabkan duplikasi data, keterlambatan pelaporan, dan potensi kesalahan dalam proses audit yang berujung pada lemahnya akuntabilitas fiskal (Nurhidayat, Nurmandi, & Misran, 2024).

Tantangan lainnya datang dari rendahnya literasi digital di kalangan aparatur pemerintah, terutama di daerah. Rendahnya kompetensi ini menyebabkan sistem yang sudah tersedia tidak digunakan secara optimal. Selain itu, banyak pegawai masih melakukan proses pengelolaan keuangan secara manual meskipun sistem digital telah tersedia. Dalam hal ini, keberadaan regulasi seperti Perpres No. 95 Tahun 2018 tentang SPBE belum mampu mendorong implementasi yang masif tanpa dukungan pelatihan berkelanjutan dan pengawasan melekat dari pusat (Susanto & Makmur, 2024). Secara umum, perkembangan *E-Government* di Indonesia berada pada tahap *enhanced* dalam model tahapan *E-Government* dari United Nations. Informasi keuangan memang telah tersedia secara daring, namun interaksi dua arah dengan publik dan integrasi lintas lembaga masih lemah. Transformasi menuju tahap *transactional* atau *connected* memerlukan pendekatan yang lebih sistematis, dimulai dari pembenahan infrastruktur TIK, peningkatan kualitas SDM, serta integrasi data antar instansi secara menyeluruh (Sukarno, Rodriguez, & Nursamsiyah, 2023).

Di beberapa daerah, penerapan sistem *E-Government* berjalan lambat karena kurangnya anggaran dan resistensi budaya birokrasi terhadap perubahan. Penelitian menunjukkan bahwa resistensi ini lebih kuat di daerah dengan tradisi administratif konvensional yang sudah mengakar (Minardi, 2020). Sebagai hasilnya, ketimpangan dalam adopsi teknologi antara daerah maju dan daerah tertinggal tetap menjadi tantangan utama bagi pemerataan implementasi digitalisasi keuangan publik di Indonesia.

2. Penerapan *E-Government* di Singapura dalam Pengelolaan Keuangan Publik

Penerapan *E-Government* untuk pengelolaan keuangan publik di Singapura telah mencapai tingkat digitalisasi yang maju dengan sistem yang terintegrasi dan efisien. Singapura diakui sebagai salah satu negara dengan penerapan *E-Government* terbaik secara global. Pemerintahnya telah menggabungkan teknologi informasi dalam seluruh proses pengelolaan keuangan publik, mulai dari perencanaan anggaran, pelaporan keuangan, hingga pengawasan. Integrasi ini mendukung tingkat transparansi yang tinggi, peningkatan efisiensi operasional, serta pengendalian korupsi yang lebih efektif. Berdasarkan data *World Governance Indicators (WGI)* (2022), Singapura meraih nilai maksimal dalam aspek efektivitas pemerintahan, yang menunjukkan keberhasilan penerapan *E-Government* dalam meningkatkan mutu tata kelola publik. Singapura telah mencapai tahap *connected*.

Singapura telah berhasil mengimplementasikan *E-Government* dalam pengelolaan keuangan publik secara menyeluruh dan terintegrasi. Sistem seperti GeBIZ untuk pengadaan barang dan jasa, serta Central Provident Fund (CPF) untuk pengelolaan dana pensiun dan kewajiban fiskal telah terhubung secara real-time dalam ekosistem digital yang kuat. Keberhasilan ini tidak lepas dari komitmen kuat pemerintah Singapura untuk menjadikan



teknologi sebagai fondasi utama dalam pelayanan publik, termasuk dalam aspek keuangan (Sukarno et al., 2023)

Sistem *E-Government* di Singapura telah mencapai tahap connected, di mana seluruh proses mulai dari perencanaan anggaran, pelaksanaan, pelaporan hingga pengawasan dapat dilakukan secara digital dan saling terhubung antar lembaga. Efisiensi tercipta karena pengurangan proses manual, penghematan waktu, serta kemampuan sistem untuk mendeteksi anomali atau penyimpangan dalam realisasi anggaran secara otomatis (Minardi, 2020). Hal ini memperkuat transparansi dan memperkecil peluang terjadinya penyalahgunaan dana publik.

Partisipasi publik juga menjadi pilar penting dalam sistem *E-Government* Singapura. Dengan menerapkan prinsip open data, masyarakat dapat mengakses laporan keuangan negara secara online, menilai efektivitas anggaran, dan ikut serta dalam proses pengawasan secara tidak langsung. Praktik ini telah meningkatkan kepercayaan publik terhadap pemerintah dan memperkuat akuntabilitas fiskal (Ahn & Chen, 2022). Di samping infrastruktur teknologi yang memadai, faktor budaya birokrasi dan kapasitas SDM di Singapura juga memainkan peran penting. Aparatur sipil negara di sana mendapatkan pelatihan intensif tentang literasi digital dan inovasi administratif sejak tahap awal karier mereka. Pendekatan ini menciptakan lingkungan kerja yang adaptif terhadap teknologi, sekaligus mendorong efisiensi dalam pengelolaan keuangan negara (Nurhidayat et al., 2024).

3. Perbandingan *E-Government* di Indonesia dan Singapura

Penerapan *E-Government* dalam pengelolaan manajemen keuangan pada organisasi publik menjadi indikator penting untuk menilai kualitas tata kelola pemerintahan di era digital. Dalam konteks ini, Indonesia dan Singapura menunjukkan dua pendekatan yang sangat berbeda baik dalam kesiapan infrastruktur, integrasi sistem, maupun budaya birokrasi yang mendukung. Perbandingan ini menjadi penting sebagai bahan refleksi dan evaluasi terhadap efektivitas implementasi digitalisasi keuangan publik di Indonesia agar dapat mengejar ketertinggalan dari negara-negara yang sudah lebih maju secara sistematis seperti Singapura.

Secara umum, *E-Government* di Singapura telah mencapai level “connected” berdasarkan klasifikasi United Nations. Dalam tahap ini, sistem digital pemerintah tidak hanya menyediakan informasi dan layanan, tetapi juga memungkinkan integrasi lintas lembaga dengan data yang real-time dan akurat. Hal ini dapat dilihat dari keberadaan platform seperti GeBIZ (Government Electronic Business), VITAL, dan Smart Nation, yang mendukung proses pengadaan barang dan jasa, pengelolaan dana, serta pelaporan keuangan secara menyeluruh dan otomatis. Penggunaan teknologi Artificial Intelligence (AI) dan Internet of Things (IoT) di dalam sistem pelaporan fiskal juga memperkuat kemampuan prediktif pemerintah dalam mengambil kebijakan anggaran yang berbasis data (Sukarno et al., 2023).

Sebaliknya, Indonesia masih berada pada tahap “enhanced” menuju “interactive”, yang ditandai dengan adanya sistem informasi keuangan seperti SIPD, SIMDA BPKP, SAKTI, dan e-Monev. Namun, sistem-sistem ini cenderung terfragmentasi dan tidak terintegrasi dalam satu arsitektur nasional. Akibatnya, proses pelaporan anggaran antar lembaga masih sering mengalami keterlambatan dan redundansi data. Kelemahan ini tidak hanya memperlambat pengambilan keputusan fiskal, tetapi juga membuka celah terhadap inefisiensi dan potensi penyimpangan (Susanto & Makmur, 2024). Di tingkat organisasi publik, banyak instansi masih



mengandalkan penginputan data manual dalam sistem yang berbeda-beda, tanpa adanya interoperabilitas antarsistem.

Dari sisi tata kelola, Singapura telah berhasil membangun ekosistem manajemen keuangan publik yang efisien, transparan, dan berbasis outcome. Sistem pelaporan keuangan diintegrasikan dengan indikator kinerja organisasi, sehingga setiap alokasi anggaran dapat dievaluasi berdasarkan hasil yang dicapai. Dengan demikian, proses manajemen keuangan tidak lagi bersifat administratif, melainkan strategis. Praktik ini sejalan dengan prinsip New Public Management yang menekankan pentingnya akuntabilitas berbasis hasil dalam pengelolaan sektor publik (Minardi, 2020)

Sementara itu, di Indonesia, pengelolaan keuangan publik masih didominasi oleh pendekatan berbasis input dan kepatuhan administratif. Laporan keuangan lebih sering disusun untuk memenuhi tuntutan regulasi, bukan sebagai alat evaluasi kinerja. Dalam banyak kasus, penganggaran program tidak berdasarkan kebutuhan berbasis data, tetapi atas dasar alokasi historis. Hal ini menghambat organisasi publik untuk bertindak adaptif terhadap perubahan lingkungan fiskal, seperti yang terjadi selama pandemi COVID-19, di mana banyak pemerintah daerah kesulitan merealokasi anggaran karena keterbatasan sistem digital dan keterlambatan pelaporan (Nurhidayat et al., 2024).

Komitmen politik juga menjadi pembeda besar antara kedua negara. Pemerintah Singapura sejak awal telah menempatkan digitalisasi sebagai prioritas nasional dan menugaskan lembaga khusus seperti GovTech untuk mengawal transformasi digital sektor publik. Setiap instansi publik diharuskan menyelaraskan sistem internalnya dengan standar arsitektur nasional, termasuk dalam hal pengelolaan keuangan. Sebaliknya, di Indonesia, meskipun sudah ada Perpres No. 95 Tahun 2018 tentang SPBE, implementasinya di daerah masih sangat bervariasi dan cenderung tergantung pada inisiatif pimpinan daerah. Tanpa adanya insentif, pengawasan, dan pendampingan yang kuat dari pemerintah pusat, penerapan *E-Government* di organisasi publik sering kali stagnan (Wijaya, Alfitri, Thamrin, & Salya, 2024).

Selain itu, aspek literasi digital aparatur negara menjadi faktor penting yang membedakan kesiapan SDM dalam mengelola sistem keuangan berbasis digital. Singapura secara rutin melatih pegawai publik dalam penggunaan teknologi baru dan membangun budaya kerja berbasis data. Di Indonesia, pelatihan seperti ini masih terbatas dan belum menyeluruh. Banyak pegawai belum memiliki keterampilan dasar dalam penggunaan sistem informasi keuangan, sehingga keberadaan teknologi canggih sekalipun tidak menjamin efisiensi (Nurhidayat et al., 2024).

Dari sudut pandang manajemen organisasi publik, pendekatan Singapura mencerminkan strategi top-down yang kuat namun fleksibel, dengan akuntabilitas yang tinggi dan fokus pada hasil. Hal ini berbanding terbalik dengan Indonesia, yang masih berjuang mengatasi tumpang tindih sistem, rendahnya interoperabilitas data, serta lemahnya pemantauan dan evaluasi keuangan secara digital. Oleh karena itu, perbandingan ini tidak hanya menunjukkan kesenjangan teknologi, tetapi juga menggambarkan perbedaan filosofi dalam tata kelola keuangan publik antara kedua negara.



KESIMPULAN

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perbandingan penerapan *E-Government* dalam pengelolaan manajemen keuangan publik di Indonesia dan Singapura. Hasil kajian menunjukkan bahwa Singapura telah berhasil mencapai tingkat digitalisasi yang terintegrasi dan efisien dalam sistem keuangan publik melalui platform seperti GeBIZ dan CPF, serta didukung oleh infrastruktur teknologi yang kuat, literasi digital tinggi pada aparatur, dan budaya birokrasi yang adaptif. Sebaliknya, Indonesia masih berada pada tahap pengembangan yang ditandai dengan fragmentasi sistem, rendahnya integrasi data antar instansi, dan kurangnya kesiapan sumber daya manusia dalam mengelola sistem digital. Perbedaan ini mencerminkan bahwa keberhasilan *E-Government* sangat bergantung pada sinergi antara teknologi, kapasitas birokrasi, dan komitmen kelembagaan. Oleh karena itu, Indonesia perlu memperkuat integrasi sistem informasi keuangan secara nasional, meningkatkan pelatihan literasi digital bagi aparatur sipil negara, serta membangun sistem evaluasi dan pengawasan berbasis data agar implementasi *E-Government* mampu mendorong efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan publik secara optimal.

DAFTAR RUJUKAN

- Ahn, Michael J., & Chen, Yu Che. (2022). Digital transformation toward AI-augmented public administration: The perception of government employees and the willingness to use AI in government. *Government Information Quarterly*, 39(2), 101664. <https://doi.org/10.1016/J.GIQ.2021.101664>
- Arief, Verdico. (2023). E-Government di Asia Tenggara: Perbandingan Pengembangan E-Government di Singapura, Malaysia dan Indonesia. *Social Issues Quarterly*, 1(2), 345–362.
- Aw, Muhammad Jafar. (2024). Dampak E-Government dalam Meningkatkan Efisiensi dan Efektivitas Tata Kelola Pemerintahan. *Politika Progresif: Jurnal Hukum, Politik Dan Humaniora*, 1, 204–226. <https://doi.org/https://doi.org/10.62383/progres.v1i4.1303>
- Gondokusumo, Gandatmadi. (2023). Transformasi Singapura menjadi Pusat Keuangan Global.
- Khoiriyanti, Dwi. (2022). Pebandingan Implementasi E-Government Di Indonesia Dengan Singapura (Studi Kasus Pelaksanaan E-Government). *Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi*, 12(1), 38–51. <https://doi.org/10.33592/jiia.v12i1.2346>
- Minardi, Anton. (2020). Comparative study of information and communication technology (ICT) application in government service between Singapore and Indonesia. *International Journal of Scientific and Technology Research*, 9(1), 2856–2867.
- Nurhidayat, Nurhidayat, Nurmandi, Achmad, & Misran, Misran. (2024). Evaluation of the Challenges of E-Government Implementation: Analysis of the E-Government Development Index in Indonesia. *Jurnal Manajemen Pelayanan Publik*, 8(2), 371–383. <https://doi.org/10.24198/jmpp.v8i2.52759>
- Risya Nurindahsari, & Trisyanto, Rendra. (2022). Pengaruh Penerapan Sistem Informasi E-Government terhadap Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah



- (Studi Kasus Pada Pemerintah Kota Bandung). *Indonesian Accounting Research Journal*, 2(3), 251–257. <https://doi.org/10.35313/iarj.v2i3.4128>
- Sukarno, Mohamad, Rodriguez, Mike Joy, & Nursamsiyah. (2023). E-Government Development on Control Corruption : A Lesson Learned from Singapore. 11(3), 271–286. <https://doi.org/https://doi.org/10.18196/jgpp.v11i3.21447>
- Susanto, Hendra, & Makmur, Hedian. (2024). The influence of information technology, administrative management and knowledge management practices on the success of e-government in Indonesia. *International Journal of Data and Network Science*, 8(4), 2119–2126. <https://doi.org/10.5267/j.ijdns.2024.6.019>
- Wau, Miya Monika, & Dompok, Timbul. (2022). Pebandingan Implementasi E-Government Di Indonesia Dengan Singapura (Studi Kasus Pelaksanaan E-Government). *Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi*, 12(1), 38–51. <https://doi.org/10.33592/jiia.v12i1.2346>
- Wijaya, Sandita, Alfitri, Thamrin, M. Husni, & Salya, Dida H. (2024). The Impact of Electronic Government Policy on Transparency and Accountability in Public Services. *International Journal of Science and Society*, 6(2), 411–421. <https://doi.org/10.54783/ijssoc.v6i2.1157>
- Yam, Jim Hoy. (2024). Kajian Penelitian: Tinjauan Literatur Sebagai Metode Penelitian. *Jurnal Empire*, 4(1), 61–70.